



VARIA LEGISLATIF

DEMAK (KR) - Setelah melalui pembahasan kurang lebih satu bulan, DPRD Kabupaten Demak sepakat menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak tahun anggaran 2021. Tentunya dengan sejumlah rekomendasi dan saran-saran demi menjaga pemerintahan daerah dalam track yang benar.

nomi Kabupaten Demak dilaporkan tumbuh positif 2,62 persen. Meningkatkan dibandingkan tahun 2020 yang tumbuh minus 0,23 persen.

Pada saat sama tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun sebesar 2,03 persen dibanding tahun sebelumnya. Yakni tercatat sebesar 5,28 persen pada 2021, sementara tahun 2020 dilaporkan 7,31persen. Berbeda halnya dengan angka kemiskinan yang meningkat 0,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari semula 12,54 persen pada 2020 menjadi 12,92 persen pada 2021.

Terhadap kondisi tersebut, sejumlah rekomendasi dan saran pun diberikan pihak legislatif agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih baik di tahun mendatang. Sebagaimana diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisi Slamet, rekomendasi pertama yang diberikan adalah percepatan pemulihan ekonomi. Termasuk di dalamnya menurunkan angka kemiskinan.

"Pembangunan daerah Kabupaten Demak pada 2021 terindikasi berhasil. Ditandai pertumbuhan ekonomi dari minus menjadi plus, walaupun belum bisa mencapai target,

* Terhadap LKPJ Bupati 2021

DPRD Demak Rekomendasikan Percepatan Pemulihan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan dan Reformasi Birokrasi



Ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisi Slamet didampingi Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Gerindra H Maskuri dan Fraksi Partai Golkar Nur Wachid, serta disaksikan Bupati dr HJ Eisi' anah, saat menandatangani draf rekomendasi dan saran terhadap LKPJ Bupati Demak tahun anggaran 2021.

namun hal itu merupakan indikator kinerja baik. Yang menjadi pertanyaan, kenapa angka kemiskinan naik? Di sini lah perlunya evaluasi. Apakah yang salah? Inovasi sudah, dukungan anggaran juga sudah. Berarti strateginya yang perlu dievaluasi," urainya, Selasa (26/4).

Menurut FBS, demikian Fahrudin Bisi Slamet disapa, Covid-19 tidak bisa menjadi alasan naiknya kemiskinan. Sebab telah ada anggaran jaring pengaman sosial yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak Covid-19.

"Tahun 2021 adalah tahun kedua

(pandemi). Pastinya sudah ada perbaikan. Maka itu jangan berikan bantuan terus-menerus yang sifatnya konsumtif. Mestinya sekaligus diberi pelatihan bersifat mendidik masyarakat agar mampu bangkit dan mandiri sehingga memiliki pendapatan sendiri," imbuhnya.

Sebelumnya, DPRD Demak telah merekomendasikan percepatan pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan dan reformasi birokrasi. Ditegaskan, hal itu penting karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Sehingga mestinya, lanjut politisi PDIP itu, yang perlu menjadi evaluasi berikutnya terkait penempatan pejabat di masing-masing OPD.

"Ketika ada yang tidak bisa memahami tugas dan tanggung jawabnya, hendaknya segera diganti dengan SDM mumpuni yang mampu menerjemahkan dan mewujudkan visi misi bupati. Karena saat ini sudah pertengahan 2022, maka perlu akselerasi pemerintahan sehingga segala yang telah dijanjikan saat kampanye terwujud di 2024," kata FBS.

Ketiga, lanjutnya, LKPJ yang dinilai adalah kinerja atau outcomenya. Maka yang dinilai adalah, anggaran yang sudah digelontorkan sekian miliar bahkan triliun rupiah itu adakah manfaat untuk masyarakat? Maka dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, setiap hasilnya wajib ada manfaatnya bagi masyarakat. Jika tidak, dapat dikatakan bahwa LKPJ Bupati belum sesuai harapan. * ssj

TERIMA PENGHARGAAN MENDAGRI

DIY Laboratorium Satpol PP

YOGYA (KR) - Kemendagri menunjuk Provinsi DIY sebagai laboratorium Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Indonesia. Satpol PP DIY menjadi yang terbaik, sehingga mendapatkan Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.

"Sesuai arahan yang diberikan Pak Menteri Dalam Negeri, mudah-mudahan DIY ini bisa menjadi laboratorium bagi 547 satpol yang lain di kabupaten, kota dan provinsi di seluruh Indonesia," kata Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri Bernhard E Rondonuwu seperti dikutip Antara dari laman resmi Pemda DIY, Selasa (26/4).

Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai kepala daerah yang berhasil membawa Satpol PP di wilayahnya berprestasi. Penghargaan itu, pantas diperoleh DIY didasarkan sejumlah penilaian.

Bernhard menilai fungsi koordinasi Satpol PP DIY luar biasa sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan penegakan perda dari provinsi sampai ke daerah-daerah. Penganggaran untuk Satpol PP di DIY sangat besar, sehingga instansi itu mampu memberikan bantuan kepada masyarakat lewat pemerintah desa dan kecamatan.

"Di Indonesia, baru ini ada (Pol PP memberikan bantuan). Jadi, ini merupakan pionir karena selama ini jajaran Pol PP itu sangat dikenal dengan kekurangan anggaran. Tetapi, justru di Yogyakarta bisa," ucap Bernhard. (Ant)-f

H-7 IDUL FITRI

Penumpang Angkutan Umum Mulai Meningkat

JAKARTA (KR) - Pergerakan penumpang angkutan umum pada Senin (25/4) atau H-7 Hari Raya Idul Fitri mulai meningkat jika dibandingkan hari biasa. Berdasarkan data sementara Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2022, tercatat adanya peningkatan hampir di semua moda transportasi.

Pemantauan pergerakan penumpang mudik pada tahun ini dilakukan di 111 terminal bus, 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandara, 110 pelabuhan laut, dan 13 Daop/Divre.

"Kenaikan jumlah penumpang terjadi pada angkutan jalan, laut, dan kereta api. Sementara untuk angkutan udara jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan hari biasa. Melalui data ini, kami mem-

prediksi masyarakat sudah mulai melakukan mudik lebih awal, sesuai anjuran Pemerintah untuk menghindari kepadatan di hari puncak mudik (28-30 April 2022)," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemhub) Adita Irawati di Jakarta, Selasa (26/4).

Dijelaskan Adita, secara rinci data sementara pergerakan penumpang pada angkutan jalan (angkutan bus), realisasi jumlah penumpang pada H-7 sebesar 88.162 penumpang, atau meningkat 63,5 persen jika dibandingkan hari biasa sebesar 62.760 penumpang. (Imd)-d

Daftar

Sementara itu, dari kuota haji Indonesia sebanyak 100.051, DIY mendapatkan jatah 1.437 jemaah (empat kloter). Rinciannya, 1.427 kuota jemaah, 2 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan 8 petugas haji daerah.

Untuk Jawa Tengah mendapat kuota 13.868 jemaah. Sedang Jawa Timur 16.048 dan Jawa Barat 17.679. Jatah kuota provinsi tersebut tertuang dalam Keputusan

Sambungan hal 1

Menteri Agama (KMA) No 405 tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M, yang ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tertanggal 22 April 2022. "Alhamdulillah, KMA terkait pembagian kuota haji sudah resmi ditandatangani," kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Kabd PHU) Kanwil Kemenag DIY H Nadhiif kepada KR, Selasa (26/4). (VinFie)-f

Penerbangan

Gubernur memberikan dukungan penuh atas dibukanya rute penerbangan internasional pertama di YIA yakni Kuala Lumpur-Yogyakarta ataupun sebaliknya yang mulai

Sambungan hal 1

aktif pada 29 April 2022 mendatang. Bahkan Sultan meminta, agar ke depannya juga dibuka rute untuk penerbangan internasional dari negara lainnya. (Rul/Ria)-f

Airlangga:

Kasus aktif tertinggi terdapat di Provinsi Lampung dengan 964 kasus," ujar Menko Airlangga.

Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar menegaskan, laju capaian vaksinasi juga menjadi kabar menggembirakan. Kebijakan Pemerintah menetapkan vaksinasi booster sebagai syarat mudik mampu mendorong capaian vaksinasi.

Sambungan hal 1

Menurut Ketum Golkar, hanya tersisa dua provinsi yang vaksinasi Dosis 1 masih di bawah 70 persen, yakni Papua dan Papua Barat. "Sudah ada 22 provinsi yang mencapai lebih dari 70 persen vaksinasi Dosis 2. Sementara, ada 25 provinsi yang vaksinasi Dosis 3 atau booster di atas 10 persen, dengan 18 provinsi berada di luar Jawa-Bali," tegas Menko Airlangga. (Fie)-f



Sumbangan naskah bisa dikirim ke email naskahkr@gmail.com

Resolusi Kemalangan di Hari Kemenangan

KH Ahmad Sugeng Utomo

UNTUK mengatasi dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah menjalankan banyak program, mulai penyaluran bantuan sosial (Bansos), bantuan bagi PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pendanaan kepada pemegang Kartu Pra Kerja, subsidi listrik, hingga insentif usaha. Program-program sosial kemanusiaan di tengah pandemi tersebut sangat disyukuri dan harus diapresiasi.

Namun apakah lantaran program-program tersebut kemiskinan dan nestapa anak yatim-piatu lantas hilang? Tentu tidak dipungkiri kita masih bisa dengan mudah menjumpai masyarakat yang terlihat sangat memprihatinkan hidupnya.

Contoh, beberapa waktu saya menyaksikan ada seorang laki-laki mengayuh sepeda *onthel* menjelang waktu berbuka puasa. Dia membongkang dua keranjang berisi barang-barang rongsokan, seperti botol minuman bekas, kardus, dan lain sebagainya. Sembari menggendong anak balitanya dengan *sayut*, si bapak ini menghentikn kayuhan sepedanya untuk beristirahat sejenak. Menurut pengakuannya, ia melakukan pekerjaan memulangnya dengan selalu membawa anak balitanya karena istrinya sudah tiada sejak usia anaknya empat bulan. Sementara kerugiannya ataupun keluarga istrinya sama-sama serba tidak memungkinkan untuk membantunya merawat anaknya karena sama-sama dalam kondisi penuh kesusahan. Ia dengan balitanya tinggal di sebuah kos-kosan yang bertarif Rp 200 ribu/bulan, yang harus dengan sangat susah payah dia membayarnya.

Kondisi bapak dan anaknya ini merepresentasikan kemalangan yang diakibatkan kemiskinan sekaligus status yatim-piatu. Kondisi ini bisa jadi dialami banyak orang, termasuk akibat pandemi. Kondisi memprihatinkan ini barangkali karena tidak terjangkau oleh program pemerintah, atau karena alasan lain, seperti karena faktor kartu tanda penduduk mereka beralamat tidak sebagaimana tempat domisilinya atau karena persoalan pendataan pihak desa yang kurang akurat.

Seandainya paket program bantuan dari pemerintah di atas menyasar bapak dan anak ini beserta mereka yang senasib dengan keduanya, atau mungkin ada uluran tangan dari der-



mawan yang menjadi tetangganya, mestinya mereka tidak harus tampak semalang itu.

Dalam Islam sesungguhnya terdapat ajaran tentang sistem jaring pengaman sosial melalui kepedulian sosial, yaitu zakat, infaq, dan shadaqah. Ajaran ini bahkan sudah melembaga dalam lembaga amil zakat infaq shadaqah (LAZIS) yang jumlahnya sangat banyak.

Pertanyaannya, mengapa kita masih bisa dengan mudah menjumpai kemalangan seperti yang ditunjukkan semisal si bapak dan si anak di atas? Apakah karena minimnya jumlah zakat, infaq, dan shadaqah yang kita keluarkan? Atau apakah karena tata kelola pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah mesti dievaluasi?

Di bulan puasa ini, amalan kebaikan dilipatgandakan pahalanya, termasuk zakat, infaq, dan shadaqah. Oleh karenanya, tidak seharusnya di bulan ini kita menjumpai kemalangan yang dialami oleh saudara kita, baik saudara seiman ataupun sebangsa dan saudara dalam kemanusiaan. Karena bulan ini adalah saat yang di-dambakan oleh para pengamal filantropi. Terlebih, di hari raya Idul Fitri nanti, hari kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan berpuasa. Sudah seharusnya kemenangan nanti juga dirasakan oleh mereka yang menderita kemalangan. Ibarat muslim bagi muslim lainnya, ibarat manusia dengan manusia lainnya yang tercipta dari asal yang sama dan oleh pencipta yang sama. Ibarat satu tubuh, jika ada bagian dari tubuh yang merasakan kemalangan pasti anggota yang lain akan turut merasakannya. Bila kita dalam kemenangan, mengapa tidak kita menangkan mereka dari kemalangan? Bukankah kemalangan mereka kita rasakan sebagai kemalangan kita pula? Bukankah kemenangan kita terasa sempurna jika tidak ada dari kita yang merasakan kemalangan? Mari kita raih kemenangan bersama-sama dengan memenangkan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kemalangan, agar kemenangan kita terasa sempurna. Bukankah begitu? (*)-d

KH Ahmad Sugeng Utomo,

Pengasuh PP Daarul Ulum Wal Hikam (Ponpes DAWAM) Yogyakarta, Inisiator dan Ketua Dewan Rainsa Santriprenuer Indonesia, Wakil Raisa Syuriah PCNU Kota Yogyakarta dan Aiwam Syuriah PWNU DIY.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KURNIA SEWON

Kantor Pusat : Jl. Parangtritis No 192A, Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta Telp. 0274-419351
Kantor Kas : Jl. Imogiri Timur Km. 15 Dukuh, Imogiri, Bantul Telp. 0274-2810647
Email : bprkurniasewon@gmail.com Website : www.kurniasewon.co.id

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI DESEMBER 2021

Laporan Posisi Keuangan (Dalam Ribuan Rupiah)

ASET	Des 2021	Des 2020
Kas dalam Rupiah	218.193	330.048
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Sertifikat Berharga	0	0
Penempatan pada Bank Lain	24.240.777	14.987.894
-/-: Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	8.207	0
Jumlah	24.232.570	14.987.894
Kredit yang Diberikan	0	0
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	865.084	897.438
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	112.424.743	89.470.712
-/-: Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1.023.427	1.348.058
Jumlah	111.946.220	89.142.092
Agunan yang Diambil Arah	472.172	1.098.263
Aset Tetap dan Inventaris	0	0
a. Tanah dan Bangunan	4.203.284	4.203.284
b. -/-: Akumulasi penyusutan dan penurunan	244.334	133.147
c. Inventaris	2.563.894	1.789.182
d. -/-: Akumulasi penyusutan dan penurunan	1.130.198	1.095.538
Aset Tidak Berwujud	34.480	4.500
-/-: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	4.500	4.500
Aset lainnya	2.140.525	1.803.928
Total Aset	148.114.480	115.845.710

LIABILIAS (Dalam Ribuan Rupiah)

	Des 2021	Des 2020
Liabilitas Segera	180.613	157.291
Simpangan	0	0
a. Tabungan	10.439.525	7.373.148
b. Deposito	98.851.295	78.198.895
Simpangan oleh Bank Lain	17.000.000	10.000.000
Prisipal yang Diterima	7.346.411	7.868.323
Dana Pihak Ketiga	0	0
Liabilitas Lainnya	461.447	322.891
Total Liabilitas	134.249.494	103.915.560

EKUIVAS (Dalam Ribuan Rupiah)

	Des 2021	Des 2020
Modal Disetor	0	0
a. Modal Dasar	8.000.000	8.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	8.000.000	4.000.000
Tambahan Modal Disetor	0	0
a. Agio (Disagio)	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Seloran Modal-Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain	0	0
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai	0	0
b. Keuntungan Realisasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas	0	0
Cadangan	0	0
a. Utang	4.844.587	4.844.587
b. Tjrujan	500.000	500.000
Labo (Kugi)	0	0
a. Tabung-tahun Lalu	2.394.081	2.435.140
b. Tahun berjalan	3.184.514	2.136.423
Total Ekuitas	13.465.184	11.916.190

Laporan Kualitas Aset Produktif (Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	L	DPK	Normal Dalam Ribuan Rupiah				Jumlah
			KL	D	M		
Penempatan pada bank lain	24.240.777	0	0	0	0	24.240.777	
Kredit yang Diberikan	0	0	0	0	0	0	
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0	
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0	
c. Kepada non bank - pihak terkait	869.415	0	0	0	0	869.415	
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	95.541.702	12.829.038	0	122.875	5.137.494	113.434.309	
Jumlah Aset Produktif	122.354.894	12.829.038	0	122.875	5.137.494	140.446.501	
Rasio - rasio (%)							
a. KPRM					22,10		
b. KAP					3,72		
c. PPA					100,00		
d. NPL (neto)					4,11		
e. ROA					2,91		
f. BOPO					80,24		
g. LDR					81,90		
h. Cash Ratio					15,88		

Laporan Komitmen Kontinjensi (Dalam Ribuan Rupiah)

POS	Des 2021	Des 2020
TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen lainnya	0	0
KEWAJIBAN KOMITMEN	100.000	0
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	100.000	0
b. Penerimaan kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
TAGIHAN KONTINJENSI	8.591.311	4.740.741
a. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	1.338.744	1.040.154
b. Aset produktif yang dihapus buku	7.255.567	5.720.407
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
KEWAJIBAN KONTINJENSI	0	0
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA	0	0

Laporan Informasi Lainnya

Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak)
DIREKSI	1. W. BONI FREDIANTO, STP_Mt (52,00%)	Ya
1. ALBERTUS NOJENDRA PUNGKAS NOGRAHA		
2. ARIS HARSAYA	2. SARAH PARSALUAN LUMBAN GAOL (25,00%)	Tidak
DEWAN KOMSARIS		
1. TRITUTAMI RRRN WIDYANTINI (23,00%)	3. TRITUTAMI RRRN WIDYANTINI (23,00%)	Tidak
2. W. BONI FREDIANTO, STP_Mt		

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan : Kristianto Purwokowidodo, SE, MM, Akt, CA, CPA

1. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp 10M wajib diaudit oleh Akuntan Publik
2. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp 10M wajib dipertanggungjawabkan dengan RUPS atau diaudit oleh Akuntan Publik
3. Informasi keuangan di atas disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kebijaksanaan Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39/SE.OJK/03/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16/SE.OJK/03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39/SE.OJK/03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.
4. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
5. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

Yogyakarta, 31 Desember 2021

**Direksi
PT BPR KURNIA SEWON**

1. Albertus Nojendra Pungkas Nograha
2. Aris Harsaya

Terdaftar dan Diawasi oleh:

Simpanan dijamin oleh:

LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN